

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teoritis

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Arti Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu “empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “gaya” tapi juga merupakan “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu” tapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus (Zubaedi, 2015).

Sedangkan Menurut Totok dan Poerwoko (2012) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Singgih (2013) dalam bukunya pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak, yang bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Kemiskinan bersifat multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, Pengetahuan

dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi 2001)

Dalam pandangan Kiranto (2005), Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran mampu mengambil tindakan tepat atas berbagai permasalahan yang dialami. Konsep pemberdayaan mengemuka sejak dicanangkannya Strategi Global WHO tahun 1984, yang ditidakanjuti dengan rencana aksi dalam Piagam Ottawa (1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang perlunya mendorong terciptanya kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, reorientasi dalam pelayanan kesehatan, keterampilan individu dan gerakan masyarakat.

Menurut Munawa (2011) mengartikan bahwa pemberdayaan yang betul ialah, pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara Perekonomian, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.

Dapat di artikan bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat / petani yang bertujuan agar suatu kelompok masyarakat bisa mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian dikalangan masyarakat serta bisa mengelola sumber daya yang tersedia.

## **2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam melaksanakan pemberdayaan tentu tidak lepas dari tahap-tahap, agar pemberdayaan terlaksana sesuai dengan program yang sesuai dengan tujuan. Maka dari itu pemberdayaan memiliki tujuh tahapan yang dilakukan sebagai berikut (Soekanto, 1987).

#### **a. Tahap persiapan.**

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu persiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua persiapan lapangan yakni lokasi atau komunitas masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan.

#### **b. Tahap pengkajian (*assessment*).**

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian atau mengidentifikasi masalah dalam masyarakat.

##### 1) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan.

Pada tahapan ini pelaku pemberdayaan sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi.

##### 2) Tahap permormulasian rencana aksi.

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

##### 3) Tahap pelaksanaa program atau kegiatan.

Dalam upaya pelaksanaa program pememberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

##### 4) Tahap evaluasi.

Sebagai proses pengawasan dari warga dan pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dan melibatkan warga.

##### 5) Tahap terminasi.

Tahap ini merupakan tahapan akhir atau pemutusan berhubungan dengan secara formal dengan komunitas sasaran.

### **3. Tujuan Pemberdayaan**

Mardikanto dan Soebianto (2017) mengemukakan bahwa “pemberdayaan” merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*People Centered Development*). Mengacu pada konsep-konsep

pemberdayaan, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya sebagai berikut:

- 1) Perbaikan Pengetahuan (*better education*), pemberdayaan di rancang sebagai suatu bentuk Pengetahuan yang lebih baik.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan tumbuh dan perkembangannya semangat belajar seumur hidup, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitasnya. Utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), dengan berbekal perbaikan Pengetahuan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik.

Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya Pemberdayaan Masyarakat akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat (Hamid, 2018).

#### **4. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Definisi CSR (*Corporate Social Responsibility*) Suatu konsep yang banyak diperbincang oleh para ahli, CSR belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun memiliki esensi yang sama. Johnson (2006) mendefinisikan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*” Definisi ini diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan.

Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, lewat publikasinya “*Making Good Business Sense*” mendefinisikan *Corporate Social Responsibility*: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to*

*economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” Definisi tersebut menunjukkan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang diangkat 9 dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Ranah tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggungjawab CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Karena itu dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab CSR. Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:

**a. *Sustainability.***

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Karena itu sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

**b. *Accountability.***

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi.

Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *Stakeholder* eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan. Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif. Menurut Crowther David (2008) menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan.

Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik antara lain: *1. Understand-ability to all parties concerned 2. Relevance to the users of the information provided. Reability and terms of accuracy of measurement, representation of impact and freedom from bias 4. Comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations*

**c. *Transparancy.***

Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Crowther David (2008) menyatakan: “*transparancy, as principle, means that the eksternal impact of the actions of the organisation can be ascertained from that organisation as reporting and pertinent pack as are not this guised within that reporting. The effect of the action of the organisation, including eksternal impacts, should be apparent to all from using the information provided by the organisation’s reporting mechanism*”. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Dalam menjalankan suatu program seperti CSR harus ada prinsip-prinsip yang menjadi acuan agar CSR tersebut bisa terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

## 5. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan manjur. Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga oleh Eko Endarmoko (2007), efektif adalah:

- 1) Kemanjuran, kemujaraban (obat).
- 2) Keberhasilan (usaha dan tindakan).
- 3) Hal mulai berlakunya (tentang undang-undang dan peraturan).

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertiandicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan berhubungan denganantara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Effendy (1989) Efektivitas juga merupakan daya pesan untuk berhubungan denganatau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut iyahul ulum (2004)

Defenisi lain dari Kata efektif ialah, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut iga rosalina (2013)

Sedangkan menurut Mahsun (2006) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan berhubungan denganantara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berberhubungan dengandengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dansasaran akhir

kebijakan (*spending wisely*). Efektifitas ialah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu objek apakah searah dengan hal yang telah direncanakan agar tidak keluar dari rencana awal dan dapat diukur apakah program berjalan lancar. Dalam menentukan Ukuran Efektivitas dapat diukur dengan adanya perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Jika usaha atau hasil dan suatu tindakan yang dilakukan tersebut tidak tepat maka akan menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka demikian dikatakan tidak efektif. Ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak, menurut Gibson (2005) yaitu:

- 1) Adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kejelasan dari strategi pencapaian tujuan
- 3) Adanya proses analisis dan perumusan yang benar
- 4) Adanya perencanaan yang matang
- 5) Adanya penyusunan program yang tepat
- 6) Adanya sarana dan prasarana
- 7) Adanya pelaksanaan efektif dan efisien
- 8) Adanya sistem pengawasan dan pengendalian

## **6. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Kata efektif berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Iga Rosalina (2013), dalam mencapai Efektivitas terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi:

### **a. Keterlibatan Petani.**

Menurut (Purnamasari, 2008), menyatakan bahwa partisipasi secara sederhana adalah keikutsertaan tersebut sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antar individu atau kelompok masyarakat lain. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kelompok tersebut, yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan pikiran dan tenaga kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap upaya membantu berhasilnya program. Kemampuan berpartisipasi dalam anggapan dasarnya tersimpul implikasi

bahwa merupakan hasil dari suatu proses sikap, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan serta penggunaan metode, sarana dan alat yang menjadi kelengkapan dalam berbuat yang artinya masyarakat petani diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Partisipasi merupakan keikutsertaan yang lebih dipengaruhi oleh kehendak sendiri dengan sukarela dan itu merupakan secara spontan.

#### **b. Pengalaman Petani.**

Menurut (Husinsyah, 2014) pengalaman membuat cara berpikir lebih baik (rasional) terhadap apa yang dilakukan dan mampu mengambil keputusan atas berbagai alternatif yang dihadapi. Sedangkan menurut (Yulianti, 2015) mengemukakan bahwa pengalaman seseorang pada umumnya akan mempengaruhi cara berpikirnya. Dengan pengalaman maka seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas, mudah mengembangkan ide-ide, mudah mengadopsi teknologi dan makin dinamis sikapnya terhadap hal-hal baru terutama dalam menghadapi perubahan yang lebih modern.

#### **c. Peran Penyuluh.**

Peran penyuluh sebagai konsultasi menurut Mardikanto (2009), yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Fasilitasi atau pendampingan adalah peran penyuluhan dalam hal melayani, memenuhi kebutuhan petani, memfasilitasi keluhan petani ataupun masalah usahatani yang dihadapi petani. Fasilitasi yang diberikan penyuluhan ini tidak sepenuhnya dapat membantu petani mengatasi masalah usahatannya namun hanya sebagai penengah dalam mengatasi masalah petani.

#### **d. Peran Stakeholder.**

Menurut Freedman yang mendefinisikan *stakeholders* yaitu: “*Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives*” (Wahyudi Isa dan Azheri B, 2008). Selanjutnya, *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan yang berbeda. Stakeholder dapat diartikan juga sebagai setiap orang

atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengerahui oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan (Widjaja Gunawan & Pratama Y, 2008).

## **7. Kesejahteraan Petani**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, yang artinya tidak memiliki kekurangan dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat pasal 1 ayat 1, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan, material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Menurut Sinaga (2017) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupan yang baik dan berkeadilan. Keadaan sejahtera dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tidak terjadi kelaparan yaitu kekurangan sandang, papan dan pangan dikalangan suatu masyarakat. Sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan hari esok dan hari berikutnya. Dengan demikian maka penindasan dan perasaan takut dapat dihindarkan. Masyarakat sejahtera dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang aman, tentang dan bahagia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani merupakan suatu kondisi dimana petani sudah mendapatkan pendapatan yang cukup dari hasil usahatannya sehingga kehidupan yang dijalannya menjadi lebih layak dan terhindar dari kekurangan bahan sandang, papan, dan pangan.

Menurut Euis Sunarti *dalam* Astuti (2019) Ruang lingkup kesejahteraan secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran.
- 2) Kesejahteraan sosial, yaitu masyarakat sudah mulai berkembang ditandai dengan adanya kreativitas, produktif, terampil dan selalu bersikap optimis serta adanya dukungan sosial dalam pemberian manfaat kesehatan dan lain sebagainya.

- 3) Kesejahteraan psikologis, yaitu berkaitan dengan suasana hati, tidak adanya gangguan mental pada masyarakat, merasa puas atas kegiatan dalam kehidupan yang dijalannya serta arti kehidupan bagi mereka.

## **8. Tanaman Kopi (Coffea sp.)**

Tanaman kopi merupakan tanaman perkebunan yang berasal dari Benua Afrika, tepatnya dari negara Ethiopia pada abad ke-9. Suku Ethiopia memasukan biji kopi sebagai makanan mereka yang dikombinasikan dengan makanan pokok lainnya, seperti daging dan ikan. Tanaman ini mulai diperkenalkan di dunia pada abad ke-17 di India. Selanjutnya, tanaman kopi menyebar ke Benua Eropa oleh seorang yang berkebangsaan Belanda dan terus dilanjutkan ke Negara lain termasuk ke wilayah jajahannya yaitu Indonesia (Panggabean, 2011). Di Indonesia kopi mulai dikenal pada tahun 1696, yang dibawa oleh VOC.

Tanaman kopi di Indonesia mulai diproduksi di pulau Jawa, dan hanya bersifat coba- coba, tetapi karena hasilnya memuaskan dan dipandang oleh VOC cukup menguntungkan sebagai komoditi perdagangan maka VOC menyebarkannya ke berbagai daerah agar para penduduk menanamnya (Najiyanti dan Danarti, 2007).

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo, 2012).

## **B. Hasil Pengkajian Terdahulu**

### **1. Penelitian yang dilakukan Oleh Evvy Saputra**

Penelitian yang dilakukan oleh Evvy Saputra (2016) tentang “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat dalam kelompok usaha bersama (kUBE) (studi kasus pada kUBE gayam Kecamatan tambelan kabupaten bintang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam KUBE Gayam di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintang. Pengambilan sample dilakukan secara senagaja terhadap 13 Kelompok, hasil penelitian menunjukan Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintang yaitu a).

Minimnya sarana dan prasarana, kurangnya dana untuk pekan makan ikan serta adanya campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. b). Memecahkan persoalan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yaitu dengan melakukan musyawarah. Dalam memecahkan masalah yang dihadapi anggota-anggota melakukan rapat dua kali seminggu. c). Keefektifan tindakan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan setiap kelompok selalu gotong royong dan berkerja sama. Dengan menggunakan strategi gotong royong, dipercaya dapat membahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi dari masyarakat. Dalam hal program tersebut sangat di perlukan peran pemberdaya dan penyuluh agar supaya peberdayaan berjalan lancar sealain sebagai fungsi fasilitator penyuluh juga dapat menjadi guru dalam melakukan bebarapa kegitan dalam usaha KUBE mulai dari penyiapan, pelaksanaan, penjualan sampai dengan anlisis untung rugi.

## **2. Jurnal yang di buat Oleh Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya**

Dalam jurnal yang di buat oleh Nuskhiya Asfi dan Holi Bina wijaya yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan pada program gerdu kempling di kelurahan kemijen kota semarang, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Timur yang memiliki jumlah keluarga miskin melalui Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. Ruang lingkup wilayah penelitian meliputi batas administrasi Kelurahan Kemijen. Kelurahan Kemijen secara adminitrasi termasuk dalam wilayah. Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Kelurahan ini terdiri atas 82 (delapan puluh dua) wilayah Rukun Tetangga (RT) dan 11(sebelas) wilayah Rukun Warga (RW). Adapun luas wilayah Kelurahan adalah 141 Ha Metode penelitian yang digunakan adalah metodi skoring yang berhubungan dengan kemiskinan antara lain: pendapatan, mata pencaharian, tabungan, kesehatan, Pengetahuan, sanitasi, jenis lantai, rumah jenis dinding dan jenis bahan bakar memasak. Adapun faktor faktor berhubungan dengan pemberdayaan antara lain:

- 1) Kesempatan dalam Menentukan Pilihan Peluang untuk menentukan pilihan merupakan komponen kedua dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Somerville (1998) dalam Lawson dan Kearns (2010), menyatakan bahwa dengan kunci pemberdayaan adalah menempatkan warga atau masyarakat dalam posisi di mana mereka dapat memilih cara yang mereka inginkan untuk perubahan. Kemampuan Dalam Bertindak Komponen ketiga dari pemberdayaan masyarakat adalah melembagakan

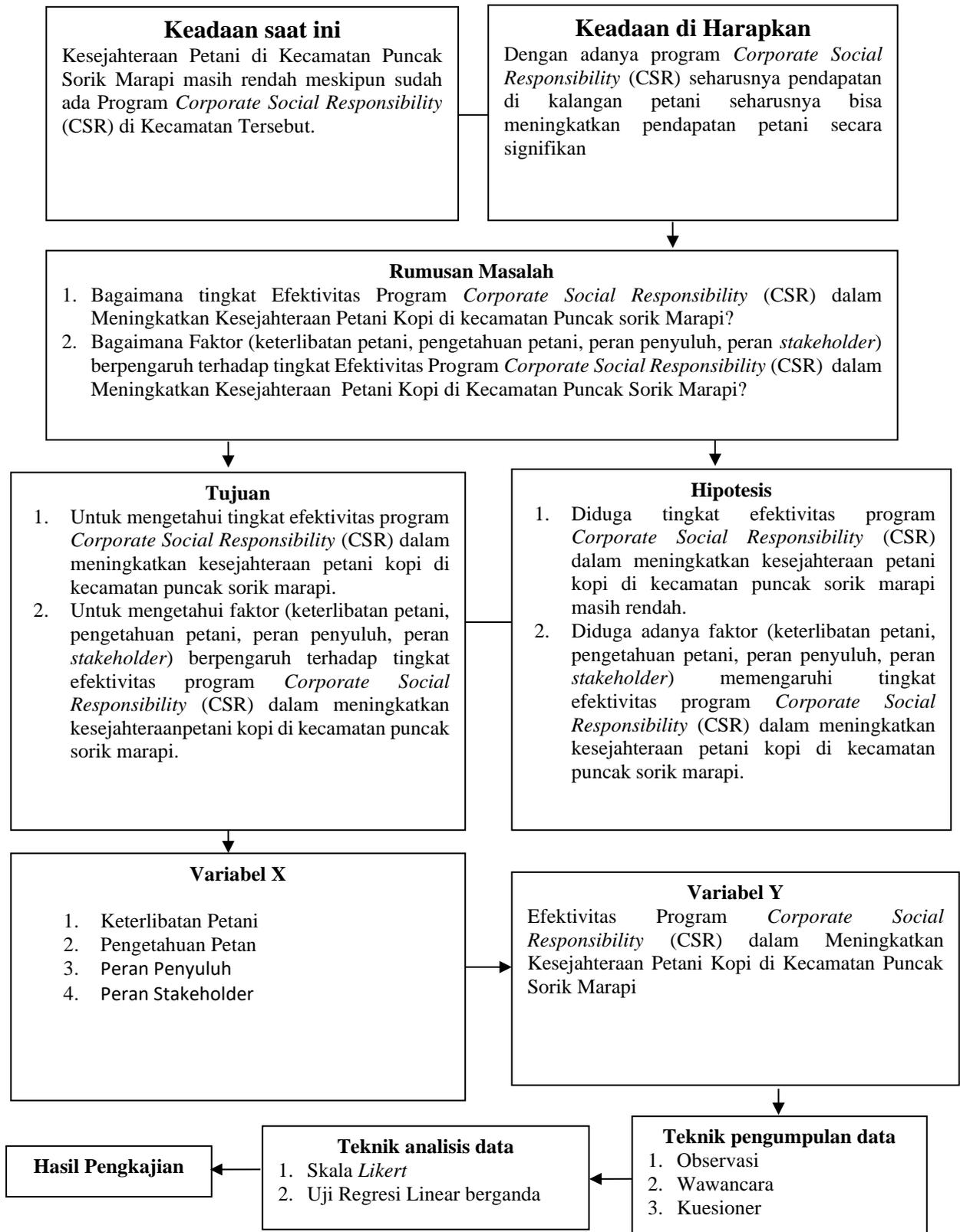
- 2) Tindakan berdasarkan keputusan yang dibuat sehingga masyarakat mencapai tujuan mereka yaitu pilihan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Kemampuan untuk melembagakan tindakan akan tergantung pada jenis dan sifat pilihan yang dibuat, dan juga memiliki kerangka kerja kebijakan yang tepat, sumber daya, organisasi mendukung dan konteks masyarakat yang mendukung yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan koneksi yang tepat/jaringan (Maginn, 2004) dalam dalam Lawson dan Kearns, 2010). Dengan menggunakan analisis berupa skala *likert* didapatkan data berupa skor dengan jumlah point tertinggi ialah 150 dan terendah 50 sedangkan untuk jumlah nilai dari responden yang di lakukan wawancara dan penyebaran kuisioner didapat nilai 106, 3 dan dalam garis continuum didapatkan data bahwa di kelurahan tersebut masih dalam skala rawan miskin.

### **3. Skripsi yang ditulis oleh Yunia Ayuningtyas**

Dalam skripsi dengan judul Keefektivan Program Gapoktan ( gabungan kelompok tani ) dalam meningkatkan produksi hasil pertanian sebagai upaya pemberdayaan masyarakat petani Desa sumberagung moyudan Kabupaten sleman yogyakarta, dibuat oleh Nadra Yunia Ayuningtyas (2014) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Desa Sumberagung, (2) keberhasilan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di Desa Sumberagung, (3) keberhasilan program Gapoktan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Desa Sumberagung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah pengelola Gapoktan Desa Sumberagung, anggota Gapoktan Desa Sumberagung dan masyarakat sekitar di wilayah Desa Sumberagung. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi,

pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program Gapoktan Desa Sumberagung dalam meningkatkan produksi hasil pertanian cukup lancar meliputi: SL PTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu), reklamasi lahan, pengembangan sistem tanam SRI (System of Rice Intencification), pengembangan tanam tabela, gerakan pengendalian hama tikus dengan burung Tyto Alba.

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengkajian

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian, maka diberikan hipotesis:

1. Diduga tingkat efektivitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara masih rendah.
2. Diduga faktor (keterlibatan petani, pengetahuan petani, peran penyuluh, peran *stakeholder*) mempengaruhi tingkat efektivitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.